

SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: THE STRATEGY FOR PREVENTING GOVERNMENT FINANCIAL REPORT FRAUD

Nedi hendri

nedi_hendri@yahoo.com, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Metro

Shinta Ulan Sari

shintasari3@gmail.com, Akuntansi, Universitas Padjajaran

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode untuk menghentikan penipuan laporan keuangan, baik di negara maju maupun berkembang. Metode penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dipopulerkan oleh Kitchenham. Penggunaan pendekatan ini, diharapkan dapat berguna untuk mengetahui cara mencegah penipuan laporan keuangan pemerintah yang dapat diidentifikasi, dikumpulkan, dan disatukan. Pengendalian Internal yang Baik dan Efektif, Peningkatan Budaya Organisasi, Pembuatan Kebijakan dan Prosedur untuk Mencegah Fraud (kebijakan anti-fraud), Whistle Blowing, dan Pelaksanaan Akutansi Forensik adalah beberapa strategi yang efektif untuk mencegah penipuan laporan keuangan, menurut hasil sintesis enam belas artikel.

Kata Kunci : Strategy, Preventing, Governance, Financial Report, Fraud.

Abstract

The purpose of this study is to identify strategies for preventing financial statement fraud in both industrialized and developing nations. The systematic literature review (SLR), made popular by Kitchenham, is the research methodology used. This strategy is anticipated to be helpful in understanding how to stop fake government financial reports that can be located, gathered, and aggregated. The synthesis of sixteen articles suggests that good and effective internal control, improved organizational culture, the creation of anti-fraud policies and procedures, whistleblowing, and the use of forensic accounting are some of the most successful methods for preventing financial statement fraud.

Key Word: *Strategy, Preventing, Governance, Financial Report, Fraud.*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang *fraud* selalu menarik perhatian banyak orang. Menurut *Securities and Exchange Commission* (SEC), penipuan adalah ilegal, yang dapat dilakukan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan metode atau sarana perdagangan antar negara atau surat atau layanan dari bursa saham mana pun di negara mana pun (Sholihah dan Prasetyono, 2016). Sementara itu, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan kecurangan sebagai serangkaian penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi dan orang-orang eksternal dan internalnya (Gunadi, 2001). Sedangkan *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) berdasarkan Black's Law Dictionary mendefinisikan *Fraud* sebagai setiap kegiatan yang menggunakan penipuan untuk mencapai keuntungan. Penipuan menjadi tindakan kriminal ketika seseorang dengan sengaja mengabaikan kebenaran atau menyembunyikan fakta material. *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE), membagi *fraud* ke dalam tiga jenis, antara lain: penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan dan korupsi. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia Tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter, *Fraud* yang paling terjadi di Indonesia yaitu Korupsi (64,4%) dengan total kerugian Rp373.650.000.000,00. *Fraud* Laporan Keuangan menempati posisi ketiga dengan presentase 9,2% dan total kerugian sebesar Rp242.260.000.000,00 (ACFE Indonesia, 2020). Meskipun menempati posisi ketiga, *fraud* pelaporan keuangan tidak boleh dipandang sebagai masalah yang sepele. Karena Laporan keuangan menjadi parameter utama dalam penentuan kinerja perusahaan.

Menurut ACFE Manual 2020, kerugian yang disebabkan oleh *fraud* laporan keuangan lebih sering dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar atau kehilangan nilai pemegang saham daripada kerugian aset keuangan secara langsung. Hal ini mengurangi risiko penipuan laporan keuangan. Namun, penipuan laporan keuangan dapat sangat merugikan perusahaan, bahkan yang paling besar. Nilai pemegang saham dapat hilang. Selain itu, dapat sangat berdampak pada pemegang saham organisasi penipuan yang pernah terjadi di beberapa perusahaan diantaranya yaitu pada PT Kimia Farma Tbk, TP KAI dan PT Garuda Indonesia Tbk. Pada Laporan Keuangan TA 2001 PT. Kimia Farma Tbk., didapatkan bahwa terjadi manipulasi Laporan Keuangan, sehingga menyebabkan adanya overstated persediaan sebesar Rp8,1 miliar, overstated penjualan sebesar Rp10,7 miliar. Kesalahan penyajian tersebut menimbulkan laba 'rekayasa' yang sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada PT KAI (Kereta Api Indonesia). Laporan Keuangan PT KAI TA 2005 mencatat laba sebesar Rp 6,9 miliar, padahal kondisinya senyatanya mengalami kerugian sebesar Rp. 63 miliar. Pada Tahun 2019, berita tentang manipulasi laporan keuangan PT GIA cukup menarik perhatian banyak pihak. Pada Laporan Keuangan PT GIA Tahun 2018 tercatat menerima laba bersih US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Tercatatnya Laba tersebut karena adanya pencatatan pendapatan yang tidak memenuhi kriteria sebagai pendapatan sebesar US\$ 306,88 juta.

Pengeluaran masyarakat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan operasinya. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan bebas dari kecurangan dan penipuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah penipuan laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kecurangan, yang didasarkan pada teori dan penelitian yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar praktik kecurangan dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini. Upaya pencegahan penipuan lebih efektif daripada upaya represif. Upaya pencegahan penipuan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar dan reputasi individu dan organisasi yang rusak. Selain itu, melakukan pencegahan dini lebih efisien dan murah daripada mendeteksi

penipuan setelah terjadi (Mansor, N. & Abdullahi, R. 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat kajian terkait strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan *fraud* laporan keuangan Pemerintah. Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dengan handal dan bebas dari *fraud*. Namun pertanggungjawaban pemerintah masih sering terdapat celah untuk dilakukan kecurangan/*fraud*. Agar tindakan *fraud* pada Pemerintah dapat dicegah maka diperlukan strategi-strategi yang efektif dalam proses pencegahan *fraud* Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode untuk menghentikan penipuan laporan keuangan, baik di negara maju maupun berkembang. Metode *Systematic Literature Review* (SLR), yang dipopulerkan oleh Kitchenham, digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan setiap pendekatan yang berguna untuk mencegah penipuan laporan keuangan pemerintah dapat diidentifikasi, dikumpulkan, dan disatukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Fraud*

Definisi *fraud* menurut KBBI adalah perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan. Berikut beberapa definisi berdasarkan beberapa sumber:

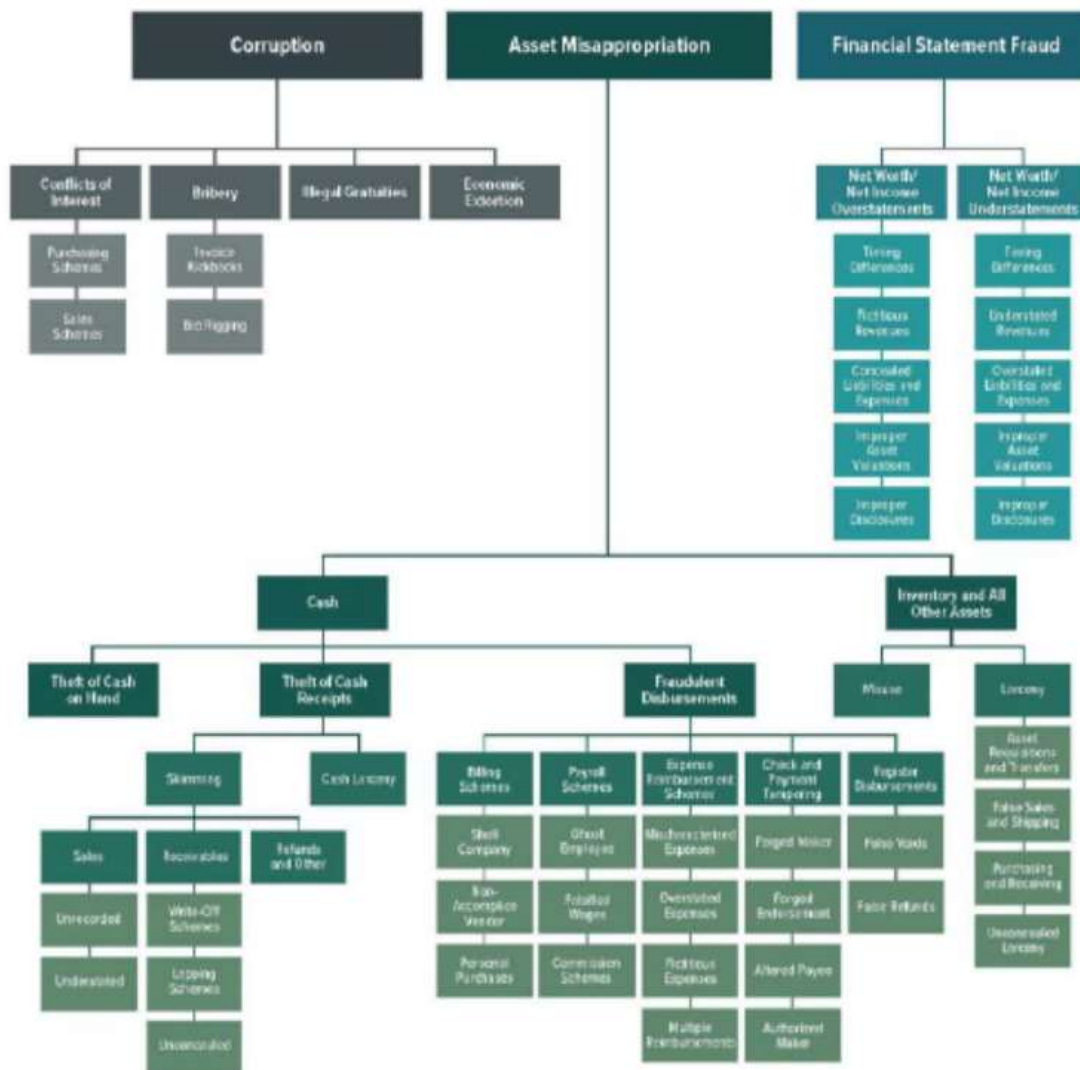
- a. The Institute of Internal Auditors (IIA)

Fraud didefinisikan sebagai kumpulan pelanggaran dan tindakan ilegal yang disengaja dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi dan oleh individu di dalam dan di luar organisasi (Gunadi, 2001). Menurut IIA, penipuan juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Ancaman kekerasan atau kekerasan fisik tidak menentukan tindakan ini. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi dengan tujuan

- b. *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

Berdasarkan Black's Law Dictionary, ACFE mendefinisikan Fraud sebagai setiap kegiatan yang menggunakan penipuan untuk mencapai keuntungan. Penipuan menjadi kejahatan ketika menutup mata pada saat mengetahui kesalahan penyajian kebenaran atau penyembunyian fakta material (ACFE, 2020).

ACFE mengklasifikasikan *fraud* dalam beberapa klasifikasi yang kemudian disebut dengan "*Fraud Tree*" Sistem Klasifikasi Penipuan dan Penyalahgunaan Pekerjaan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*) yang dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 1: Pembagian Fraud

Berdasarkan bagan di atas, ACFE mengklasifikasikan *fraud* kedalam tiga jenis berdasarkan perbuatan yaitu:

- 1) **Korupsi**
 Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam sektor publik atau pemerintah untuk keuntungan pribadi. Jenis korupsi yang didasarkan pada pohon penipuan terdiri dari empat hal: konflik kepentingan atau benturan kepentingan, penipuan atau penyuaan, hadiah ilegal, dan penipuan.
- 2) **Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)**
 Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan/pihak lain. Sifatnya yang tangible/dapat diukur dan dihitung (*defined value*) membuat fraud bentuk ini mudah dideteksi.
- 3) **Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*)**

Fraudulent Statement yang biasa diketahui sebagai *window dressing*. Dalam penyajian Laporan Keuangan, rekayasa keuangan digunakan untuk menutupi keadaan keuangan sebenarnya. Ini dilakukan untuk keuntungan pribadi dan organisasi. Pejabat eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintah melakukan hal ini.

c. SPKN PSP 100 – Standar Umum

Fraud adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang, harta, atau jasa tanpa membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga. (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017)

Fraud Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

ACFE menggambarkan kesalahan penyajian yang disengaja tentang kondisi keuangan suatu perusahaan sebagai penipuan keuangan yang dilakukan melalui salah saji yang disengaja atau penghilangan jumlah atau pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Tindakan yang disengaja dianggap sebagai penipuan laporan keuangan. Menurut Standar Internasional tentang Audit (ISA) 240, “salah saji dalam laporan keuangan dapat timbul dari kesalahan atau penipuan.” Apakah tindakan dasar yang menyebabkan laporan keuangan yang salah disengaja atau tidak disengaja adalah ciri yang membedakan kesalahan dari penipuan.” (International Standards on Auditing (ISA) 240, 2009).

Hampir selalu, penipuan laporan keuangan melibatkan mengecilkan kewajiban, biaya, dan kerugian serta meningkatkan aset, pendapatan, dan keuntungan. Misalnya, perusahaan dapat memiliki kewajiban pajak yang lebih kecil jika mereka mengecilkan aset atau pendapatan mereka. Sebagai alternatif, penipu mungkin ingin mengurangi hasil anggaran yang berlebihan satu tahun untuk membantu memperbaiki kesalahan tahun berikutnya. (ACFE, 2020)

Salah satu tugas manajemen organisasi adalah menyampaikan laporan keuangan. Sebagian besar, perampasan laporan keuangan dilakukan oleh eksekutif senior, yang memiliki dorongan dan kemampuan untuk mengubah laporan keuangan. Karena mereka bertanggung jawab secara langsung atas kinerja perusahaan, CEO sering kali menjadi pelaku fraud dalam laporan keuangan. (ACFE, 2020)

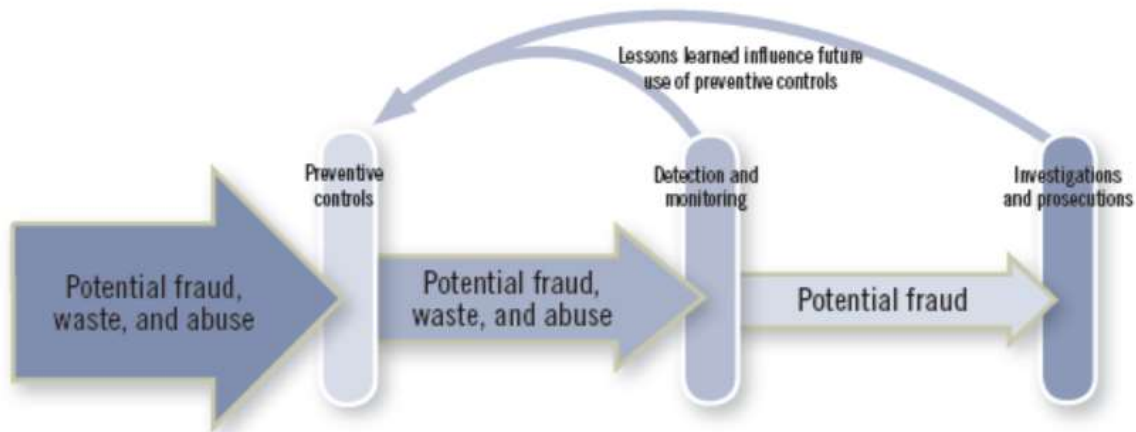
ACFE mengklasidikan *fraud* laporan keuangan ke dalam lima klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang tidak pasti
- 2) Perbedaan waktu (termasuk kesalahan pengakuan pendapatan)
- 3) Penilaian aset yang salah
- 4) Kewajiban dan biaya yang tidak diungkapkan
- 5) Pengungkapan yang salah

Pencegahan Fraud

Menurut IIPF-Practice Guide, yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (2009), pencegahan fraud mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencegah fraud terjadi dan

mengurangi eksposur fraud. Mengatur aturan yang ketat dan menanamkan budaya etika yang kuat adalah komponen penting dalam mencegah Fraud.



Gambar 2: Komponen Pencegahan Fraud

Mekanisme utama yang kuat untuk mencegah fraud adalah pengendalian internal yang efektif dan efisien, termasuk kontrol yang terkait dengan penyaringan pelanggan, vendor, dan mitra hubungan bisnis eksternal. Sebuah organisasi dengan kontrol internal yang efektif dapat mencegah pelaku dari godaan untuk melakukan *fraud*. Komite Organisasi Sponsor Komisi Treadway (COSO) menyajikan kerangka kerja untuk menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal untuk memerangi penipuan. COSO diidentifikasi lima komponen dalam Pengendalian Internal–Terintegrasi Kerangka kerja: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang dapat berfungsi sebagai premis untuk desain control dalam melawan *fraud*. Elemen-elemennya sangat terkait dan memberikan proses alamiah yang interaktif sehingga *fraud* tidak akan ditoleransi di tingkat mana pun.

METODE

Metode kajian Systematic Literature Review (SLR) digunakan dalam artikel ini. SLR melibatkan tinjauan sistematis literatur untuk menemukan, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu pada pertanyaan penelitian, area penelitian, atau fenomena yang menarik (Kitchenham & Charters, 2007). Salah satu jenis studi sekunder adalah tinjauan sistematis. Tujuan penelitian SLR adalah untuk merangkum penelitian sebelumnya dengan bukti empiris, menemukan gap penelitian baru, dan memberikan kerangka kerja untuk penelitian masa depan. (Arief, & Yunus Abbas, 2021).

SLR memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Gambar 3 menggambarkan tahapan pada SLR.



Gambar 3: Tahapan SLR (Wahono, 2015)

Pencarian data dimulai dengan mencari penelitian sebelumnya dengan menggunakan mesin pencarian di pustaka digital. Basis data yang digunakan adalah *Google Scholar*. Proses penemuan artikel terdiri dari dua tahap. Pertama, mencari artikel ilmiah dengan kata kunci “strategi pencegahan *fraud*” dengan tahun terbit 2012 s/d 2022. Pada tahap awal, ditemukan 17.500 artikel. Pada tahap kedua, proses pengumpulan artikel dilanjutkan dengan menggabungkan hasil dari tahap pertama dengan persyaratan artikel dapat menjawab pertanyaan penelitian. Metode penyaringan pada judul dan abstrak serta pemeriksaan isi artikel digunakan untuk melakukan pencarian. Sembilan belas artikel dibuat sebagai hasil dari tahap kedua pengumpulan artikel. Dari enam belas artikel, tujuh berkaitan dengan pencegahan *fraud*. Pencarian dilakukan dengan metode penyaringan pada judul dan abstrak, serta memeriksa isi artikel. Hasil pengumpulan artikel pada tahap kedua menghasilkan enam belas artikel. Dari enam belas artikel, ada tujuh artikel pencegahan *fraud* dari Pemerintah negara lain, yaitu Malaysia, Nigeria, Pakista, dan Kenya. Sedangkan sembilan artikel lainnya merupakan artikel terkait pencegahan *fraud* di Indonesia. Ke enam belas 16 yang ditemukan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya Terkait “Strategi Pencegahan *Fraud*”

No.	Penulis	Judul	Index Jurnal	Jumlah Sitasi
1	Mohamad Zulkurnai Ghazali, Mohd Syahrir Rahim, Azharudin Ali, Shamharir Abidin	A preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local government entities in Malaysia	Non-Index	61
2	Ni Wayan Rustiarini Ni Made Sunarsih	Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah	Non-Index	62

No.	Penulis	Judul	Index Jurnal	Jumlah Sitasi
3	Dian Kristiyani Hamidah	Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraudpada Sektor Publik Di Era Digital	SINTA 3	17
4	Cris Kuntadi, Bhayu Adi Puspita, Achmad Taufik	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi	Non-Index	7
5	Novia Tri Kurniasari, Anna Fariyanti, Nirwan Ristiyanto	Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process	Non-Index	18
6	Rozmita Dewi Yuniarti	The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations)	Non-Index	87
7	Syed Aamir Alam Rizvi, Dr Kazi Afaq Ahmed	Prevention of Frauds in Public Sector Organizations: A Case of Pakistan	Non-Index	
8	Memem Kustiawan	Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud	SINTA 2	18
9	Oguda Ndege Joseph, Odhiambo Albert, Prof John Byaruhanga	Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County	Non-Index	129
10	Dwi Urip Wardoyo, Muhammad Arya, Desiana Woro Pawestri, Bethari Shakuntala	Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud	Non-Index	1
11	Ismail Alhassan	Forensic Accounting and Fraud Detection and Prevention in the Nigerian Public Sector	Non-Index	6
12	Abdullahi Muahammad Rabiunoorhayati Mansor	Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory	Q2	124
13	Normah Omar, Katerina Maria Abu Bakar	Fraud prevention mechanisms of Malaysian government-linked companies: An assessment of existence and effectiveness	Non-Index	
14	Anna Yulifah	Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan	Non-Index	8
15	Rasha Kassem Dr. Andrew Higson	Financial Reporting Fraud: Are Standards' Setters and External Auditors doing enough?	Q3	40

No.	Penulis	Judul	Index Jurnal	Jumlah Sitasi
16	Okoye, E.I. and Gbegi, D.O	Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State)	Non-Index	203

Setelah enam belas artikel yang akan menjawab pertanyaan penelitian dikumpulkan, ekstraksi data akan dilakukan. Tujuan utama ekstraksi data adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian, lalu melakukan sintesis data. Sintesis data adalah proses merangkum semua temuan penelitian, menjawab pertanyaan penelitian, dan membuat kesimpulan dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil ekstraksi data dalam metode SLR, strategi-strategi yang dilakukan dalam pencegahan *fraud* dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Literature terkait Strategi Pencegahan Fraud

Penulis	Lokasi	Strategi Pencegahan Fraud
(Ghazali et al., 2014)	Pemerintahan Malaysia	- Menciptakan auditor internal - Menyediakan layanan telepon langsung atau nomor bebas pulsa untuk memudahkan pelaporan penipuan - Kebijakan yang berkaitan dengan keamanan komputer Kebijakan yang berkaitan dengan investigasi fraud, serta kode etik atau etika kerja
(Rustiarini & Sunarsih, 2015)	Bali	Sistem whistleblower
(Kristiyani & Hamidah, 2020)	Pemerintahan Indonesia	Strategi Teknis: Pengawas Privasi, Internet of Things, Akses Data, Ketepatan Waktu Pelaporan, Pengendalian Data dalam Waktu Nyata Pendekatan dua paradigma: Pendekatan budaya, Pengendalian internal (audit internal dan eksternal, investigasi fraud, dan akuntansi forensik) Strategi Pencegahan: Sistem Deteksi Penipuan menggunakan Algoritme Pengajaran Mesin, Data Mining, dan Meta Learning
(Kuntadi et al., 2022)		Kesesuaian kompensasi mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam, sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan, dan kompetensi SDM mempengaruhi pencegahan kecurangan.
(Kurniasari et al., 2019)	Salah satu Instansi Pemerintah di Indonesia	(1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian, (2) meningkatkan budaya organisasi, (3) menciptakan prinsip anti-kejahatan dalam organisasi, (4) menerapkan system pembayaran dan hukuman yang tegas, (5) memberi tahu karyawan tentang anti-kejahatan, dan (6) membangun tim perubahan.

Penulis	Lokasi	Strategi Pencegahan Fraud
(Yuniarti, 2017)	Organisasi inter-governmental di Indonesia	Membangun pengendalian internal yang baik dan meningkatkan kesadaran anti-fraud di antara semua orang di perusahaan
(Rizvi, 2021)	Pakistan	pengendalian internal, audit internal dan eksternal, pelatihan, whistle blowing, rotasi karyawan, penerapan kebijakan anti-penipuan dan hukuman, kebijakan HRM yang kuat, integritas manajemen, dan e-governance
(Kustiawan, 2017)		Meningkatkan pengendalian intern
(Ndege Joseph et al., 2015)	Kenya	Untuk menghindari dan menemukan kecurangan dalam kas daerah dan lembaga lainnya, kebijakan dan sistem pengendalian internal yang efektif harus diterapkan.
(Wardoyo et al., 2022)		Whistleblowing System Dan Surprise Audit
(Okoye et al., 2013)	Nigeria	Akuntan forensik harus diterapkan sesuai pelatihan keterampilan akuntansi forensik
(Abdullahi & Mansor, 2018)	Nigeria	Untuk meningkatkan standar hidup karyawan dan meningkatkan pendapatan gaji PNS, pemerintah Nigeria meluncurkan Reformasi Skala Gaji (SSR). Selain itu, pemerintah Nigeria harus memulai program pelatihan seperti lokakarya, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan perilaku pekerja dan meningkatkan pemahaman tentang efek buruk penipuan.
(Omar & Bakar, 2012)	Malaysia	audit kejutan, hotline penipuan, program dan pelatihan pencegahan penipuan, kebijakan anti-penipuan, ulasan kerentanan penipuan, audit operasional, kebijakan pelaporan pelanggaran, audit internal atau pemeriksaan penipuan departemen, dan, menjatuhkan hukuman dan tindakan disipliner
(Yulifah & Irianto, 2013)		Mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang berkualitas tinggi mencakup memiliki posisi audit internal untuk melakukan pengawasan rutin, menerapkan aktivitas pengendalian melalui sistem pemisahan tugas, memiliki fungsi otorisasi, memiliki fungsi dokumentasi dan perencanaan, dan mengawasi sistem akuntansi dengan standar konservatif dan baik.
(Kassem & Higson, 2012)		Memberikan lebih banyak panduan kepada auditor eksternal sehubungan dengan: untuk penilaian dan tanggapan risiko penipuan
(Eze & Okoye, E., 2019)	Nigeria	Akuntansi Forensik diganti dengan auditor eksternal dari Negara Bagian Kogi yang menerima pelatihan yang tepat dan pelatihan ulang.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat ditarik semua kesimpulan strategi-stragi pencegahan *fraud* laporan keuangan pemerintah, antara lain:

1. **Pengendalian Internal yang Baik dan Efektif**
Kesesuaian kompensasi mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam, sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan, dan kompetensi SDM mempengaruhi pencegahan kecurangan. Pengoptimalan fungsi auditor internal adalah bagian penting dari pengendalian internal. Auditor internal dapat dioptimalkan dengan mengoptimalkan peranannya dalam pembinaan SPIP dan BPKP. Selain itu, fungsi pengendalian memainkan peran yang signifikan melalui system pemisahan tugas, fungsi otorisasi, fungsi dokumentasi, dan fungsi perencanaan, serta pengendalian sistem akuntansi melalui standar konservatif yang baik (Yulifah & Irianto, 2013). Surprise audit adalah strategi pengendalian internal yang cukup efektif.
2. **Peningkatan Budaya Organisasi**
Peningkatan budaya organisasi dapat dilihat dari teladan pimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang positif serta menciptakan kesadaran di antara staf tentang integritas memupuk nilai-nilai etika. Satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anti-fraud kepada karyawan adalah misalnya organisasi harus meninjau sistem promosi karyawan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan promosi langsung. Mereka harus selalu terus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui keikutsertaan dalam pelatihan, workshop, seminar dan kegiatan pengembangan diri lainnya (Yuniarti, 2017)
3. **Membuat peraturan untuk mencegah penipuan**
Salah satu strategi terbaik untuk mencegah penipuan laporan keuangan adalah kebijakan anti-fraud, seperti kebijakan keamanan komputer, kebijakan investigasi penipuan, dan kebijakan kode etik atau etika kerja. Kebijakan harus terus dibuat, dan sosialisasi anti-rasu diperlukan untuk karyawan.
4. **Whistleblowing**
Whistleblowing adalah pengungkapan informasi tentang praktik ilegal/illegal oleh anggota organisasi/mantan anggota organisasi/masyarakat umum. *Whistleblowing* berperan penting dalam mengungkapkan kecurangan/skandal keuangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi ini yaitu meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi para *whistleblower* (Rustiarini & Sunarsih, 2015).
5. **Forensic Accounting**
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okoye et al., (2013) penggunaan Akuntansi Forensik secara signifikan mengurangi terjadinya kasus penipuan di sektor public pada salah satu kementerian di Kogi State. Namun yang menjadi catatan adalah harus diberikannya Pelatihan yang tepat dan pelatihan ulang tentang Forensik serta kepatuhan yang tepat terhadap standar akuntansi dan audit.

SIMPULAN

Untuk menemukan metode untuk mencegah penipuan laporan keuangan, studi literatur yang menyeluruh dilakukan using metodologi Itchenham. Studi dimulai dengan melakukan langkah demi langkah. Pertama, tujuan penelitian harus ditentukan (RQ). Pada tahap kedua, artikel dicari melalui basis data Google Scholar. Untuk artikel yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2022, ini merupakan tahap pertama dalam proses pencairan keyword pencarian strategi pencegahan pernyataan palsu. 17.500 artikel dibuat selama tahap pencarian pertama. Pada tahap

kedua, hasil pencarian pada tahap pertama disesuaikan dengan persyaratan berikutnya, yang berarti artikel harus dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sembilan belas artikel dipilih untuk referensi utama sebagai hasil dari pencarian artikel di tahap kedua. Artikel ini kemudian dirilis. Pada tahap akhir, data diekstraksi, proses sintesis, dan penarikan kesimpulan dari penelitian dilakukan.

Pengendalian Internal yang Baik dan Efektif, Peningkatan Budaya Organisasi, Pembuatan Kebijakan dan Prosedur untuk Mencegah Fraud (kebijakan anti-fraud), Whistle Blowing, dan Pelaksanaan Akutansi Forensik adalah beberapa strategi yang efektif untuk mencegah penipuan laporan keuangan, menurut hasil sintesis enam belas artikel.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikemukakan implikasi secara praktis yaitu sebagai masukan untuk lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang sedang membuat strategi untuk mencegah fraud laporan keuangan, kelima elemen pencegahan *fraud* di atas dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang menguji efektivitas kelima elemen pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- ACFE. (2020). Fraud Examiners Manual 2020 International Edition. In *Association of Certified Fraud Examiners, Inc.*
- ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Eze, E., & Okoye, E., I. (2019). Forensic Accounting and Fraud Detection and Prevention in Imo State Public Sector. *Accounting and Taxation Review*, 3(1), 12–26.
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100>
- Gunadi, E. M. (2001). Prevention and Detection of Fraud a Challenge to the Internal Auditors. *Kriminologi Indonesia*, 1(III), 43–49.
- International Standards on Auditing (ISA) 240. (2009). *International Standard on Auditing 240 the Auditor ' S Responsibilities Relating To Fraud in an Audit of Financial Statements*. 155–197.

- Kassem, R., & Higson, D. A. (2012). Financial Reporting Fraud: Are Standards' Setters and External Auditors doing enough? *International Journal of Business and Social Science*, 3(19).
- Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. *EBSE Technical Report EBSE-2007-01, January*, 1–57.
- Kristiyani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Sumber Daya Manusia, Kesesuaian. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
- Kustiawan, M. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345–362. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.2>
- Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57. www.ijbmi.org
- Okoye, E. I., Fiia, & Fsm, F. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3), 2222–6990.
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government-linked Companies: An assessment of existence and effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(1), 15–31.
- Rizvi, A. (2021). Prevention of Frauds in Public Sector Organizations: A Case of Pakistan. *Journal of Development and Social Sciences*, 2(III), 225–244. [https://doi.org/10.47205/jdss.2021\(2-iii\)21](https://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-iii)21)
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2015). Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 2, 1–19.
- Sholihah, S., & Prasetyono, -. (2016). Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1882>
- The Institute of Internal Auditors. (2009). Internal Auditing and fraud. In *IIPF Practice Guide*. <https://doi.org/10.1201/9781315267555-9>

- The Institute of Internal Auditors. (2019). IIA position paper. *Fraud and Internal Audit*, 1–4. <https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Fraud-and-Internal-Audit.pdf>
- Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (2017). State Financial Audit Standards (SPKN), 2017. In *BPK Regulation No.1 2017*.
- Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.
- Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & Shakuntala, B. (2022). *Whistleblowing System Dan Surprise Audit : Strategi Pencegahan Fraud*. 1(2), 157–168.
- Yulifah, A., & Irianto, G. (2013). Persepsi auditor eksternal tentang determinan pencegahan kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1–27.
- Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626>
<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4524789/garuda-diduga-manipulasi-laporan-keuangan-bagaimana-pengawasan-rini>